

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori.

1. Pandangan Tokoh NU Terkait Kepemimpinan Perempuan dalam Politik

Pandangan NU terkait kepemimpinan perempuan sendiri telah lama dibahas pada Munas NU tahun 1997 di Lombok, dimana pertemuan ini dihadiri oleh beberapa tokoh besar NU disana membahas tentang bagaimana sudut pandang Islam mengenai kepemimpinan perempuan dan bagaimana sudut pandang sosial budaya di Indonesia mengenai kepemimpinan Perempuan termasuk salah satunya juga dari kacamatan NU. Dalam pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan disana menemui sebuah hasil dimana perempuan juga memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin dengan beberapa hal yang menjadi ukuran seperti kemampuan menjadi pemimpin, bahkan sampai penerimaan khalayak umum dalam menjalankan Kepemimpinan. Meskipun demikian perempuan juga harus tetap mengingat kodratnya sebagai perempuan, dimana masih ada batasan-batasan sesuai fitrahnya sebagai perempuan. Walaupun demikian bukan berarti perempuan dianggap rendah di ranah publik dibandingkan laki-laki sehingga hasil dari keputusan Munas ini menyatakan bahwa NU sepakat merefleksikan keadilan dan kesetaraan gender, dibuat kesepakatan ini adalah salah satu bentuk yang sesuai dengan pemikiran *Al-Muswah* atau kesetaraan sebagai prinsip yang fundamental.

Pemikiran NU mengenai kepemimpinan perempuan sendiri sangat sering menjadi bahan bahasan setiap pertemuannya, tokoh-tokoh NU menganggap perempuan adalah warga yang berhak menerima kesetaraan, keadilan dan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat, bernegara dan berpolitik. Keputusan Munas NU yang dilaksanakan pada tahun 1997 juga telah dikuatkan dengan adanya keputusan dari Bahtsul Masail

al-Maudu'iyah pada muktamar ke 30 di pondok pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1999. pada dasarnya kepemimpinan perempuan sekarang sudah menjadi hal yang biasa di era modern kali ini, beberapa masyarakat juga telah banyak yang menerima pemimpin perempuan. Dalam masyarakat modern memang kepemimpinan bukan menjadi masalah pribadi akan tetapi bagaimana mampu membangun struktur politik yang lebih mengedepankan aspek feminitas atas keperempuan yang bersandar pada solidaritas dan kasih sayang serta keseimbangan dan kesinambungan.¹

Pendapat mengenai kesepakatan tentang diperbolehkannya perempuan untuk turut serta berperan aktif di ranah politik bukan begitu saja berjalan dengan sangat mulus, banyak anggota NU juga yang mempersalahkan hal demikian seperti apa yang memang telah terjadi dalam warga Nahdliyin. Kyai muda NU memang tidak pernah mempersalahkan masalah gender yang erat kaitannya dengan kepemimpinan perempuan menurut mereka siapa saja berhak menjadi pemimpin asal mampu secara intelektual dan kemampuannya dalam memimpin, sedangkan Kyai sepuh NU tetap teguh dengan pendirian dan pemikirannya bahwa laki-laki adalah sosok pemimpin yang begitu ideal baik ditingkat daerah ataupun tingkat pusat, namun dengan demikian ada pula kyai sepuh yang memberikan toleransi terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin cukup hanya sampai di daerah saja karena pemimpin negara harus laki-laki.

Terkait hal tersebut perempuan-perempuan NU juga menyuarakan pemikirannya tentang hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Shinta Nurya Wahid memunculkan pemikiran bahwa ketimpangan gender sendiri terbangun dari keluarga, Shinta menganggap bahwa ketidakadilan yang terjadi disini disebabkan oleh ajaran agama yang misogonis yang sering dianggap sebagai kebenaran mutlak atau bahkan juga seringkali

¹ Agustian Putra, *Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' Tentang Perempuan Kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018*.

ditafsirkan secara diskriminatif.² Hal ini merupakan salah satu upaya melestarikan budaya patriarki dikalangan masyarakat supaya lak-laki semakin mendominasi di ruang publik. Selanjutnya ada pemikiran dari Aisyah Baidlowi dimana beliau mengungkapkan tentang kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan mengingat dengan pendidikan dapat menata masa depan menjadi lebih baik juga sebagai salah satu upaya memperoleh kesejahteraan keluarga. Dalam bidang ekonomi perempuan juga harus diberikan dorongan supaya semakin kreatif untuk turut serta mendirikan dan membangun koperasi. Selain itu dalam ranah politik perempuan juga harus deiberikan ruang ikut berpartisipasi sebagai peserta yang nantinya menjadi wakil rakyat, bukan hanya cukup menjadi pemilih saja. Lily zakiyah munir juga mengungkapkan pendapatnya mengenai perempuan yang hanya diposisikan sebagi pelengkap laki-laki, hal demikian sangat jelas ketara bahwa budaya patriarki sangat merajalela, hal ini sangatlah bertentangan dengan pandangan Islam bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Menurut lily Islam memang tidak membebani perempuan dalam sektor produksi akan tetapi lebih pada sektor reproduksi. Namun hal demikian bukan menjadi penutup ataupun penghalang bagi perempuan jika memilih aktif dalam sektor produksi. Selain dari pemikiran beberapa perempuan diatas juga ada emikiran dari Musdah Mulia salah satu perempuan yang memiliki pemikiran gender yang begitu mainstream, beliau mendorong perempuan untuk bangkit melawan hegemoni tafsir agama yang cenderung berpihak kepada laki-laki. Perempuan seharusnya menjadi pembaharu agama yang mengajarkan tentang penghormatan kepada semua umat manusia tanpa memandang jenis kelamin, beliau juga mendorong supaya perempuan turut aktif dalam peranan politik untuk menyuarakan perbaikan hidup perempuan.

² Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminsme : Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream* : 2016, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 20. No 1, hal 70

Dari prespektif para ulama yang membahas terkait kepemimpinan perempuan adalah salah satu hal yang memang berseberangan dengan ideologi aswaja yang diikutinya dimana lebih condong kepada kepemimpinan yang ideal hanya mampu dipegang oleh laki-laki, akan tetapi dalam prinsip moderasi dan toleransi NU membolehkan perempuan menjadi pemimpin.³ Yang merujuk pada prinsip utama Islam yang tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan, selain beberapa alasan memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah salah satu bentuk atau upaya dalam membentuk kemaslahatan, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dalam tuntutan publik, khususnya bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali dalam perpolitikan di daerah ataupun negara, hal ini menjadikan NU harus mampu mengambil keputusan yang arif dan bijaksana.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Tokoh NU.

Pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh NU tidak bisa terlepas dari beberapa faktor yang mampu mempengaruhi itu semua, adapun beberapa faktor penyebab munculnya pemikiran politik tokoh NU terkait kepemimpinan perempuan dalam politik yaitu :

Pertama, Keputusan Bahtsul Masa'il NU. Keputusan yang dikemukakan oleh NU pada tahun 1997 dan tahun 1991, terdapat perbedaan yang sangat jauh dimana pada tahun 1991 menjelaskan bahwa seorang perempuan dilarang mencalonkan diri atau menjabat sebagai kepala desa kecuali dalam keadaan darurat, hukum ini mengikuti mazhab yang dalam ilmu fikih yaitu Syafi'i hambali dan maliki sebagaimana yang telah dikemukakan tentang hukum dilarangnya seorang perempuan menjadi hakim. Secara tidak langsung dalam apa yang telah dipaparkan jelas adanya jika perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam politik. Keputusan tersebut sangat bertolak belakang dengan keputusan yang

³ Jamal Ma'ruf Asmani, *Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama* : 2015, Pati, ADDIN, Vol. 9 no 1, hal 48.

ada pada tahun 1997, dimana keputusannya lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bernegara dan berpolitik. Dalam hal ini perempuan wajib menjalankan tugasnya dalam bersosial dengan tegas dan terlindungi.

Kemudian keputusan pada tahun 1997 ini diperkuat dengan putusan muktamar NU ke 30 di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, menyatakan bahwa perempuan boleh berpolitik mulai dari tingkatan daerah hingga negara. Akan tetapi pada tahun 2004 meskipun NU telah sepakat dalam mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin secara utuh, pada pemilihan presiden tahun 2004 seluruh ulama NU berkumpul dan mengajak seluruh umat untuk tidak memilih calon presiden perempuan. Hal ini menyebabkan kyai-kyai NU yang masih berpikiran bahwa masih terdapat batasan-batasan untuk perempuan dalam bersosial dan berpolitik.

Kedua, Pandangan Stereotip. beberapa pandangan negatif tentang perempuan juga masih familiar dikalangan kyai NU terutama tentang kepemimpinan perempuan. Hal ini masih ada dikarenakan kuatnya nilai-nilai serta budaya patriarki yang masih ada dikalangan masyarakat, hal itu terbentuk dari teks-teks yang ada di kitab suci dan beberapa pandangan pemimpin terdahulu terhadap perempuan.

Ketiga, Kesetaraan gender, komitmen NU dalam merefleksikan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bersosial dan berpolitik telah dibuktikan dari adanya beberapa keputusan yang mendukung secara aktif perempuan dalam politik agar mampu menuangkan peranannya secara optimal bagi kemaslahatan perempuan. Keputusan tersebut dibuat sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh NU yaitu Al musawah atau kesetaraan sebagai salah satu prinsip yang fundamental.

B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian yang telah terlaksana sebelumnya. *Pertama*, Rujukan penelitian terdahulu yaitu skripsi dari Rizki Arum Dewi Mahasiswa pemikiran

Poitik Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2017, yang berjudul kepemimpinan Perempuan Dalam Kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang menyediakan gambaran lengkap tentang eksplorasi dan klarifikasi tentang kenyataan sosial dengan menggunakan data variable. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rizki disini terdapat persamaan dengan apa yang peneliti teliti yakni kepemimpinan perempuan. Sedangkan perbedaan adalah lebih menekankan penelitiannya kepada kajian kepemimpinan perempuan dalam kemajuan desa Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, serta faktor apa saja yang menghambat dalam melaksanakan tugasnya, serta upaya apa saja yang digunakan pemimpin perempuan untuk meminimalisir hambatan tersebut.⁴

Kedua, Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik menurut Siti Musdah Mulia, Skripsi ini ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, Eka Ratna sari. Dalam skripsi ini Eka Ratna Sari memfokuskan penelitiannya mengenai kepemimpinan perempuan menurut Siti Musdah Mulia, yaitu terfokus pada pemikiran narasumber mengenai kepemimpinan perempuan, yang dilihat dari aspek feminisme dan sosial politik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Eka disini terdapat persamaan yang peneliti teliti mengenai perspektif tokoh terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik.⁵

Ketiga, Skripsi Wahyu Ismatulloh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mahasiswa Prodi Tafsir dan Hadis tahun 2014. Yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadist Lan Yufiha Qowamun wallaw Ahmaruhum Imra’atun). Penulis memaparkan hadis yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan, selain itu juga dipaparkan

⁴ Rizki Arum Dewi, (2017). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Kemajuan Desa Totokarto kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*.

⁵ Eka RatnaSari. (2017). *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia*.

pemahaman masyarakat Babakan Tasikmalaya, terhadap hadis kepemimpinan perempuan dan pandangannya terkait kepemimpinan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyu disini terdapat persamaan dengan apa yang peneliti teliti yakni pengaruh hadits misigonis terhadap kepemimpinan perempuan.⁶

Keempat, Pemikiran Gender Menurut Para Ahli : Telaah atas pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali, Engineer dan Mansour Fakih. Jurnal ini ditulis oleh Janu Arbain dkk, pada tahun 2015. Yang membahas mengenai peninjauan kembali ajaran agama yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, dengan pemikiran gender menurut para ahli. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cara menguraikan pemikiran-pemikiran para ahli yang bersumber dari buku karya ahli tersebut, serta berpatokan dari beberapa buku yang sesuai dengan studi gender. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Janu Arbain dkk disini terdapat persamaan dengan apa yang peneliti teliti yakni perspektif tokoh mengenai gender.⁷

Kelima, Penelitian yang dilakuka oleh Ahmad H Silaban pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Politik perempuan di Kota Makasar, penelitian ini berfokus pada seberapa besar peran perempuan pada ranah politik di kota Makasar, dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kepustakaan melalui arsip atau dokumen yang mendukung penelitian. Hasil penelitian Tindakan pemerintah kota Makasar terhadap perempuan belum banyak yang nyata, hal tersebut terlihat perempuan hanya diikuti sertakan dalam partai politik. Selain itu juga ikut serta dalam pencalonan legislatif serta banyak perempuan yang ikut dalam organisasi juga. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yakni perempuan berpolitik.⁸

⁶ Wahyu Ismatulloh, (2014). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis terhadap Hadits lan yufiha qowamun wallaw ahmarum imra'atun*.

⁷ Ika Novita Sari, J. N. (2015). *PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud, Asghar Ali Engineer dan Mansour Fakih*. Sawwa.

⁸Ahmad H Silaban, (2015). *Implementasi Politik Perempuan di Kota Makasar*. The POLITICS.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Yusminah Rohmatullah berjudul *Kepemimpinan perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui pendekatan Hadits dan Hubungannya*. Penelitian ini berfokus pada kajian kontroversi dalam masalah kepemimpinan perempuan dari sudut pandang ulama yang menafsirkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan kepemimpinan perempuan serta beberapa hadits yang juga relevan dengan kenegaraan. Dalam penelitian terdapat persamaan yang peneliti teliti mengenai pengaruh pemikiran politik tokoh pada kepemimpinan perempuan.⁹

Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Widya Agnes yang berjudul “*Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang mengkaji tentang kepemimpinan perempuan yang masih menuai pro dan kontra di dalam hukum Islam dengan hukum masyarakat tradisional, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum Islam dengan menggunakan beberapa hadits dan ayat al qur’an yang ada kaitannya dengan kepemimpinan perempuan dan juga menggunakan kesepakatan ulama dan menelaah hukum yang muncul dari masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat persamaan mengenai pendapat ulama ataupun tokoh agama terhadap kepemimpinan perempuan.¹⁰

Kedelapan, penelitian yang dilaksanakan oleh Dedi Saputra Napitulu, Salminawati, Novita Sari. Berjudul “*Kepemimpinan perempuan Dalam Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait kepemimpinan perempuan, dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan yakni pandangan tentang kepemimpinan perempuan.¹¹

Untuk lebih mudah memahami perbandingan penelitian terdahulu maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

⁹ Yusminah Rohmatullah, (2017). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara*. Jurnal Syariah

¹⁰ Widya Agnes, (2018). *Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Imarah.

¹¹ Novita Sari, D. S. (2020). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Al-Muaddib.

Meskipun beberapa kajian terdahulu di atas banyak yang membahas tentang kepemimpinan perempuan namun setelah dilihat dengan sekilas dari penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam sudut pandang tokoh NU di Kecamatan Gebog pada tahun 2022, sehingga dengan merujuk pada hasil penelitian terdahulu di atas adalah sebagai acuan untuk penulis, yang mana penelitian yang dilakukan penulis adalah Kepemimpinan perempuan dalam kacamata Nahdlatul Ulama yang berkonsentrasi di Kecamatan Gebog.

C. Kerangka Berfikir

Eksistensi pemikiran tokoh agama dalam memobilisasi asumsi masyarakat tetap melambung tinggi ditengah modernisasi dalam segala aspek ditengah-tengah masyarakat, tak terkecuali pemikiran-pemikiran tokoh organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama dimana pemikiran serta keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan olehnya mempunyai implikasi yang begitu luas terhadap pengaruh sosial budaya di masyarakat. Seperti halnya pemikiran-pemikiran tokoh NU mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam politik, sejatinya NU adalah organisasi sosial keagamaan yang memang sering mengusung isu-isu keadilan dan kesetaraan gender ditengah-tengah masyarakat, namun tak dipungkiri masih banyak dari tokoh NU terlebih kalangan pondok pesantren yang teguh pendirian menggunakan ayat al-qur'an dan hadits-hadist dalam menyikapi hal tersebut dengan cara menafsirkannya secara diskriminatif, sehingga banyak asumsi yang sering terdengar dimana Perempuan tidaklah pantas mendapatkan posisi pemimpin ditengah masyarakat, tak terkecuali dengan apa yang terjadi di kabupaten Kudus yang mayoritas penduduknya merupakan warga NU.

Faktor pengaruh dari beberapa aspek memang sangat besar perannya dalam pengambilan keputusan dalam hal demikian, mengingat dalam menetapkan sebuah hukum bukan hanya begitu saja melabeli segala sesuatu melainkan harus belandaskan pedoman yang kuat seperti beberapa kali yang dilakukan oleh ulama-ulama NU dalam menyikapi kontroversi kepemimpinan perempuan dalam politik, yaitu dengan mengadakan beberapa pertemuan seperti bahtsul masalah dan

lain sebagainya yang nantinya menjadi kesepakatan para ulama atau sering disebut *ijma'*, untuk menjadi rujukan kalangan dalam mengambil keputusan. Hasil tersebut sangat memberikan pengaruh dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali eksistensi perempuan dalam politik yang sering menjadi perdebatan dikalangan ulama dan masyarakat. Yang dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.



Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tokoh NU merupakan hal yang paling utama dalam menentukan keputusan salah satunya adalah tentang kepemimpinan, sedangkan dalam hasil temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa banyak beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran tersebut, sehingga dapat mempengaruhi peranan perempuan di ranah publik (Politik)